

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum untuk memilih secara langsung anggota legislatif dan kepala eksekutif di Indonesia mulai dilaksanakan sejak tahun 2004. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya pemilih dapat memilih secara langsung calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat nasional (DPR RI) maupun provinsi (DPRD Provinsi) dan kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota) melalui penerapan sistem proporsional daftar terbuka. Pada pemilu 2004 untuk pertama kalinya pemilih juga memilih secara langsung calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2005.

Sistem pemilihan secara langsung membuka ruang dan kesempatan bagi perempuan dalam kontestasi untuk meraih jabatan politik. Perempuan dapat hadir sebagai pemimpin di pemerintahan daerah dan meningkat keterwakilannya pada DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ranah lembaga legislatif mengenal aturan afirmasi yang pertama kali dimuat dalam pasal yang bersifat menghimbau dalam Undang-Undang Pemilu untuk Pemilu 2004.

Penyelenggaraan Pilkada dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2014 didasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala daerah di masing-masing wilayah. Pada masa ini, tiap daerah telah melaksanakan dua kali pilkada dengan waktu penyelenggaraan yang berbeda-beda antardaerah. Rangkaian pilkada pertama dilangsungkan dalam kurun waktu 2005-2010, dan periode kedua dalam kurun waktu 2010-2014. Perubahan penyelenggaraan pilkada menjadi secara serentak dilakukan pertama kali pada tahun 2015. Dengan demikian penyelenggaraan pilkada langsung secara serentak telah dilakukan di tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020.

Data pencalonan dalam pilkada serentak menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hanya terdapat 124 perempuan dari 1654 calon (7,26%) di 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Pada pilkada serentak tahun 2017 hanya terdapat 45 perempuan dari total 620 calon (7,26%) di 101 daerah. Sementara pada tahun 2018 hanya terdapat 94 perempuan dari 1044 calon (9%) di 171 daerah yang melangsungkan pilkada. Pada pilkada serentak tahun 2020 juga hanya terdapat 159 perempuan dari 1482 calon (10,73%) di 270 daerah. Data hasil pilkada serentak menunjukkan pada Pilkada 2015 terdapat 23 calon kepala daerah perempuan yang terpilih (8,36%). Pada Pilkada 2017 terdapat 10 perempuan yang terpilih (7,43%). Pilkada serentak 2018 menghasilkan 15 perempuan yang terpilih (8,77%). Sementara itu hasil Pilkada 2020 menunjukkan terdapat 27 perempuan yang terpilih (11,02%). Angka pencalonan dan angka calon kepala daerah terpilih menunjukkan tren meningkat namun bergerak

sangat lambat. Secara umum, baik jumlah perempuan calon maupun jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah jauh lebih rendah daripada laki-laki.

Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020. Pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan dikarenakan masa bakti Herman HN selaku walikota Bandar Lampung periode sebelumnya akan berakhir. Peserta Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 terdiri dari tiga pasangan calon. Semua pasangan calon dalam pilkada Bandar Lampung diusung oleh gabungan partai politik, tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen.

Tabel 1.1

Nama Pasangan Calon dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2020

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1	Rycko Menoza & Johan Sulaiman	Partai Golkar (6 kursi), Partai PKS (6 Kursi)	12 kursi
2	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo	Partai Demokrat (5 kursi), PAN (6 kursi), PKB (3 kursi), Perindo (2 kursi) dan PPP (1 kursi)	17 kursi
3	Eva Dwiana & Deddy Amarullah	PDIP (9 Kursi), NasDem (5 kursi) dan Gerinda (7 kursi)	21 kursi

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota maju mencalonkan diri melalui partai politik dan tidak ada paslon yang maju melalui jalur perseorangan.

Dari semua pasangan calon, terdapat satu calon perempuan, yaitu Eva Dwiana. Diketahui bahwa Eva Dwiana merupakan istri dari Herman Hn sebagai walikota sebelumnya. Kemudian sosok Yusuf Kohar sebagai kandidat nomor 2 adalah petahana yang merupakan wakil walikota pasangan Herman Hn pada periode sebelumnya. Selanjutnya sosok Rycko Menoza merupakan bupati Lampung Selatan masa jabatan 2010 sampai dengan 2015. Rycko juga merupakan putra dari mantan Gubernur Provinsi Lampung, Sjachroedin ZP. Hasil hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara tertinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara sebanyak 57,3%. Berikut tabel hasil suara pilwakot Bandar Lampung pada 21 Desember 2020:

Tabel 1.1

Hasil Suara Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020

No.	Pasangan Calon	Persentase hasil suara
1	Rycko Menoza & Johan Sulaiman	21,3%
2	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo	21,4%
3	Eva Dwiana & Deddy Amarullah	57,3%

Sumber : (Pilkada2020.kpu.go.id, 2020)

Penelitian ini memfokuskan pada pasangan calon nomor 3 yakni Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dengan alasan pasangan ini merupakan satu-satunya pasangan dengan calon perempuan dan berhasil memenangkan kontestasi pemilihan walikota

dengan perolehan suara 57,3%, mengalahkan pasangan calon lain yang memiliki latar belakang yang cukup kuat. Selain ini, pasangan Eva-Deddy juga diusung oleh tiga partai politik yang mempunyai kursi rata-rata terbanyak di parlemen, PDI Perjuangan dengan 9 kursi, Gerindra 7 kursi dan NasDem 5 kursi

1.2 Rumusan Masalah

Perempuan yang berhasil meraih posisi politik dianggap mampu menemukan cara untuk mengatasi bias struktur dan norma serta berbagai hambatan yang membatasi perempuan. (Genovese and Steckenrider, 2013). Keberhasilan dalam meminimalisir bias dan hambatan tersebut dapat dilihat dari pola kandidasi Eva Dwiana sehingga berhasil terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung. Pengalaman khas perempuan dari beragam latar belakang serta konteks sosial politik dan budaya yang berbeda membentuk peta jalan mendapatkan kekuasaan politik secara berbeda. Hal ini juga turut memengaruhi bagaimana karakteristik atau gaya kepemimpinan dan juga konsekuensi kebijakan mereka (Genovese dan Steckenrider, 2013). Berdasarkan pemahaman tersebut maka ditetapkan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pola kandidasi Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020?
- 2) Bagaimana strategi pencalonan, kampanye Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020?
- 3) Bagaimana kepemimpinan Eva Dwiana sebagai Walikota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pola kandidasi Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020
- 2) Menganalisis hambatan dan strategi pencalonan dan kampanye, dan
- 3) Menganalisis kepemimpinan Eva Dwiana sebagai Walikota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini, dari segi akademik diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan dan mengembangkan teori pemberdayaan dan penelitian tindakan atau *action research* yang telah dipelajari. Hal ini juga diharapkan penelitian ini berguna dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan dan pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat ,memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sama serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain pada kajian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi. Peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan diwujudkan melalui Pilkada. Rakyat dapat memilih pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010). Hingga saat ini, khususnya di era reformasi, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang pilkada. Tujuan dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Menurut Abdullah, pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
- b. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;

- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
- d. Mencegah politik uang (Yusdianto, 2010)

Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu 2014, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;

- c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2.2 Pola Seleksi dan Kandidasi

2.2.1 Proses Rekrutmen Kandidat

Sama halnya dengan laki-laki, agar perempuan terpilih dalam kontestasi elektoral, maka mereka harus melewati proses seleksi yang cukup panjang, mulai dari penjarangan, penyaringan, hingga penetapan calon. Dalam konteks pemilihan anggota parlemen, Norris (2006) menyebutkan bahwa perempuan harus melewati tiga hambatan penting: *Pertama*, mereka harus memilih diri mereka sendiri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (ambisi dan kesempatan/sumberdaya); *Kedua*, mereka harus dipilih sebagai calon oleh partai (seleksi partai); dan *Ketiga*, mereka harus dipilih oleh pemilih.

2.2.2 Pola Seleksi Kandidat Perempuan

Hinojosa dalam Dewi, dkk (2021) menyebutkan bahwa terdapat empat pola seleksi kandidat perempuan, yaitu: *Inclusive-centralized*, *Inclusive-decentralized*, *Exclusive-decentralized*, dan *Exclusive-centralized*.

a. *Inclusive-centralized*

Bersifat terbuka, dan melibatkan tim (selectorate) dalam jumlah yang cukup besar namun dalam pengambilan keputusan ditentukan elit pusat (nasional)

b. *Inclusive-decentralized*

Membuka kesempatan lebih besar bagi politisi partai di tingkat lokal untuk terlibat dalam proses seleksi kandidat maupun pengambilan keputusan.

c. *Exclusive-decentralized*

Memungkinkan adanya tim seleksi dalam jumlah kecil/terbatas dan proses pengambilan keputusan terjadi di tingkat lokal

d. *Exclusive-centralized*

Proses seleksi dan pengambilan keputusan hanya melibatkan sedikit orang atau bahkan satu orang di tingkat nasional.

Dalam kajiannya yang dipublikasikan dalam buku Pola Kandidasi dan Kebijakan Responsif Gender Perempuan Kepala Daerah di Indonesia, Dewi dkk (2021) menemukan bahwa dari tujuh perempuan kepala daerah yang diteliti didapatkan temuan bahwa pola seleksi dan kandidasi para kepala daerah tersebut lebih cenderung *inclusive-centralized* karena proses pencalonan bersifat terbuka, artinya proses pencalonan dimulai dari struktur partai yang paling bawah namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh elit nasional (DPP Partai).

2.3 Politik Gender

Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkan terjadinya ketidakadilan gender.

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (Echols dan Shadily, 1983). Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Neufeldt (ed.), 1984). Secara terminologis, 'gender' bisa

didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993).

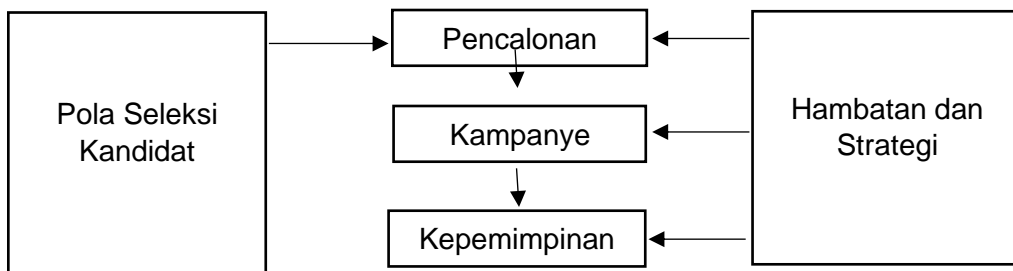
Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Partisipasi mereka apakah menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara dan lain sejenisnya, adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang.

2.4 Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan

Sebelum terpilih sebagai kepala daerah melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat, calon kepala daerah perempuan yang didukung oleh tim kampanye politiknya. Agar tujuan akhir tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan kepemimpinan semenjak proses pencalonan. Pemilihan strategi yang tepat sangat penting agar proses pemenangan bisa efektif dan efisien (secara politik dan ekonomi). Pemilihan strategi ditujukan untuk tiga hal yaitu untuk mengetahui peluang persentase kemenangan sebelum

penyelenggaraan pilkada dilaksanakan, untuk mengetahui lawan politik yang kuat, dan untuk mengetahui *resource financial* yang perlu dipersiapkan. Ketiga tujuan tersebut menjadi informasi awal menuju kemenangan pilkada (Halim, 2014).

.5 Gambar Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: diolah penulis (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam dan mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta empiris tentang pola kandidasi dan kepemimpinan Eva Dwiana, studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Secara spesifik, penelitian ini akan mencoba untuk memahami bagaimana kandidat perempuan mampu menembus berbagai rintangan struktural sehingga bisa mampu melewati tahapan pencalonan, kampanye, dan akhirnya terpilih sebagai kepala daerah.

3.2 Sumber Data Dan Informan

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sekunder.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Data Sekunder yang Dikumpulkan

Daftar Data Sekunder Dikumpulkan	Instansi
1. Hasil perolehan suara Pilwako Bandar Lampung 2020	KPU Kota Bandar Lampung
2. Data kepala daerah perempuan hasil pilkada serentak 2015 s.d. 2020 di Indonesia	KPU RI
3. Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pilwako Bandar Lampung 2020	KPU Kota Bandar Lampung
4. Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pilwako Bandar Lampung	Bawaslu Kota Bandar Lampung
5. Laporan Dana Kampanye peserta Pilwako Bandar Lampung 2020	KPU Kota Bandar Lampung

Adapun informan yang dipilih adalah menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Berikut adalah informan yang berperan dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel 3.6 dibawah.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	2	<i>Purposive sampling</i>
2	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	2	<i>Purposive sampling</i>
3	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	2	<i>Purposive sampling</i>
4	Ketua tim pemenangan pasangan calon	1	<i>Purposive sampling</i>
5	Tokoh Masyarakat	3	<i>Purposive sampling</i>
6	Tokoh perempuan	2	<i>Purposive sampling</i>
7	Pemilih	10	<i>Snowball sampling</i>

Sumber : Diolah penulis, 2022

Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam studi ini juga akan bergantung pada data informasi yang berasal dari informan, narasumber, hasil pengamatan observasi, dokumentasi kegiatan, peraturan daerah, dan buku literatur. Sedangkan teknik pengumpulan datanya sendiri menekankan pada wawancara, observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion/FGD*.

3.3. Teknik Validasi Dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah model alir yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, analisa data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data akan dilakukan dengan teknik triangulasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang akan diperkuat dengan penyajian data statistika deskriptif seperlunya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana

Eva mulai dikenal oleh masyarakat Kota Bandar Lampung sebelum suaminya terpilih menjadi walikota, yaitu sebagai pendiri dan pimpinan Majelis Taklim Rachmat Hidayat yang berdiri sejak 20 Oktober 2007. Pendirian ini berasal dari kecintaannya terhadap almarhum anak pertamanya yang bernama Rachmat Hidayat yang meninggal diusia 14 tahun setelah pulang dari umrah. Namanya memang cukup dikenal dikalangan ibu-ibu pengajian lantaran sering menggelar kegiatan sosial. Karier politiknya pun cukup mulus, mulai dari Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung Periode 2011-2016. Hingga akhirnya ia memutuskan pindah haluan menjadi anggota Partai PDIP Lampung pada Konferda 8 Maret 2015. Di Partai barunya ini, ia menjadi Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPD PDIP Lampung. Awal karir jabatan politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Ia tergabung dalam Komisi III DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 setelah meraup suara terbanyak. Padahal, namanya berada pada nomor urut 10 di PDIP. Eva Dwiana meraih 19.818 suara, urutan kedua peraih suara terbanyak dari para caleg 12 parpol yang diusung pada Pemilu 2014 untuk DPRD Lampung dari Kota Bandar Lampung. Pada 2019, Eva kembali memperoleh suara terbanyak. Bahkan separuh suara PDIP Bandar Lampung itu menopang kursi DPRD Provinsi Lampung. Hasil rekapitulasi suara di

KPU Bandar Lampung, suara Bunda Eva Dwiana tembus 86.258 dari suara partai mencapai 146.294. Tingginya perolehan suara Bunda Eva, maka saat pleno KPU Lampung yang berakhir Minggu (12/5), empat caleg PDIP dari Dapil 1 Bandar Lampung duduk di DPRD Lampung. Yakni, Kostiana (13.437), AR Suparno (4.714) dan Apriliati (4.304).

4.2. Pola kandidasi Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020

Dalam undang-undang pemilu disebutkan dengan jelas bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD merupakan partai politik (Pasal 22E ayat (3)). Begitu juga selanjutnya pada pasal (6) bahwa parpol lah yang mengusulkan pasangan capres dan wapres. Begitu juga pada UU tentang Pemda yang juga mengatur bahwa pasangan kepala daerah juga dicalonkan oleh partai politik, walaupun dibuka peluang calon independen, namun persyaratannya relatif berat.

4.2.1. Tahapan Kandidasi Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020

Untuk menganalisis tahapan kandidasi yang dilalui oleh Eva Dwiana hingga ditetapkan sebagai calon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, akan digunakan proses rekrutmen sebagaimana yang dirumuskan oleh Matland (2002) yang terdiri dari: seleksi diri, seleksi partai, dan terpilih.

4.1.2. Seleksi diri: keinginan/ambisi dan sumber daya yang dimiliki oleh Eva Dwiana

Sebelum akhirnya dipilih dan diusung oleh partai Partai PDI Perjuangan dan dua partai koalisi lain yaitu Partai Nasdem dan Partai Gerindra, keputusan Eva Dwiana untuk mengikuti pilkada serentak tahun 2020 merupakan suatu pilihan yang cukup berani, paling tidak karena tiga alasan: *Pertama*, sebelumnya belum ada Walikota Bandar Lampung perempuan. Jika terpilih, maka Eva Dwiana akan menjadi Walikota Bandar Lampung yang pertama. Penelitian Ardiansa (2021) menemukan bahwa perempuan kepala daerah kerap kali dituntut melakukan negosiasi identitas gendernya. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi sejak masa pencalonan, kampanye hingga kepemimpinannya. *Kedua*, Eva Dwiana baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode kedua. Ketika ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota tahun 2020, ia baru satu tahun menjalani posisi sebagai anggota dewan. Tentu saja keputusan untuk mengikuti pilkada berimplikasi dengan kewajiban bagi Eva Dwiana untuk melepaskan jabatan anggota dewan. Hal ini sesuai dengan amar putusan MK dalam memutuskan *judicial review* beberapa pasal UU Pilkada dimana salah satu putusannya memerintahkan anggota dewan harus mundur jika ingin maju dalam Pilkada. Artinya, mengikuti pilkada merupakan pertarungan besar bagi Eva Dwiana. *Ketiga*, lawan politik atau pasangan calon lain yang mendaftar juga sangat perlu untuk diperhitungkan. Walaupun Eva juga memiliki potensi menang yang tidak kecil karena suaminya, Herman HN merupakan

Walikota Bandar Lampung sebelumnya, bakal calon yang lain juga perlu diantisipasi, di antaranya Yusuf Kohar adalah petahana yang merupakan wakil walikota pasangan Herman Hn pada periode sebelumnya

4.1.3. Seleksi partai politik: tahapan penjaringan, penyaringan, dan penetapan

Sesuai dengan konsep proses rekrutmen sebagaimana yang dirumuskan oleh Matland (2002), bahwa setelah seleksi diri, tahapan selanjutnya adalah seleksi dari partai politik, dalam hal ini dari partai pengusungnya, Partai PDI Perjuangan. Dalam proses ini, terdapat beberapa tahap, yaitu: tahap penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap penetapan.

a. tahap penjaringan

Dalam tahapan penjaringan, para kandidat melakukan pendaftaran pada partai politik. Eva Dwiana merupakan salah satu dari tujuh kandidat yang mendaftar pada Partai PDI Perjuangan. Ia mendaftar di sekretariat penjaringan bakal calon (Balon) Wali Kota di DPC PDI Perjuangan,

b. tahap penetapan

Sebelum penetapan calon walikota yang diusung oleh PDI Perjuangan, terjadi dinamika politik yang dinamis, dimana beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung pencalonan Eva Dwiana disinyalir akan merubah arah dukungan.

4.1.4 Seleksi oleh Pemilih: Kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amrullah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2021-2024

Setelah melalui proses pada partai politik, maka proses selanjutnya yaitu sebagaimana dirumuskan oleh Matland (2002) adalah proses terpilihnya pasangan calon. Menurut Matland (2002), hambatan calon untuk memenangi kontestasi pemilihan umum, terutama perempuan, lebih besar pada pemilihan yang menganut sistem proporsional dengan daftar tertutup dimana nomor urut ditentukan oleh partai politik karena seringkali partai tidak menempatkan perempuan pada posisi urutan atas. Sementara itu, dalam konteks Pilkada di Indonesia yang menggunakan sistem pluralitas atau mayoritas sederhana, desain pemilihan lebih berfokus kepada kandidat, sehingga pengaruh dari kandidat relatif lebih besar dari partai politik.

4.1.5 Pola Kandidasi Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020

Berdasarkan klasifikasi pola rekrutmen ini, pada konteks kandidasi Eva Dwiana lebih dekat kepada pola yang ketiga, yaitu pola kombinasi, dimana pada awalnya Eva Dwiana mencoba untuk mengikuti pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung kemudian baru mengikuti Pilkada di Kota Bandar Lampung. Eva Dwiana pertama kali mengikuti pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2014 dengan suara terbanyak dari partai pengusungnya, Partai PDI-P. Selanjutnya pada periode

berikutnya, Eva kembali mengikuti pemilihan yang sama dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilihan tahun 2019 dengan suara terbanyak. Namun, periode kedua ini tidak diselesaikan hingga tuntas karena Eva Dwiana membulatkan tekad untuk mengikuti pemilihan Walikota Bandar Lampung pada tahun 2020. Salah satu perhitungan Eva Dwiana memberanikan tampil sebagai salah satu calon walikota adalah berkaca pada kemenangan dengan suara signifikan pada dua kali pemilihan anggota DPRD Provinsi Bandar Lampung.

4.3 Strategi dari Pencalonan hingga Kampanye

Eva Dwiana dalam menuju pucuk pimpinan sebagai wali kota Bandar Lampung memiliki strategi yang luar biasa, diantaranya dengan cara memupuk dan memelihara jaringan yang telah dibangunnya sejak elektabilitas kepemimpinan suaminya yaitu Herman HN yang menjadi wali kota Bandar Lampung sebelumnya. Disamping itu beliau juga menjalin kedekatan secara emosional dan sering mengunjungi masyarakat dengan cara blusukan.

4.2. Kepemimpinan Eva Dwiana sebagai Walikota Bandar Lampung

4.2.2. Karakteristik kepemimpinan Eva Dwiana

Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Eva Dwiana adalah lebih halus dan lembut serta berhati-hati dalam berbicara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Budi Kurniawan salah seorang akademisi kampus Universitas Lampung mengatakan bahwa : gaya kepemimpinan Eva Dwiana cenderung lebih halus dan lembut serta berhati-hati

dalam berbicara. sedang Kalau Herman HN kan orangnya ceplas-ceplos, cenderung tidak bisa mengontrol kata-kata. Mungkin Bunda Eva akan lebih halus dan tidak menyukai konflik (*Gaya Kepemimpinan*, n.d.)

4.4.2 Kepribadian yang dekat dengan masyarakat

Karena kepribadian yang dekat dengan masyarakat yang kuat maka masyarakat mencintai dan mendukungnya secara militan ketika beliau mencalonkan Wali Kota Bandar Lampung.

4.4.3. Memiliki potensi sebagai pemimpin

Dalam menuju kepemimpinan menjadi wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Eva Dwiana dalam memimpin memiliki potensi dan karakteristik sebagai pemimpin yang mampu meraih suara umat dengan kegiatan majlis talimnya. Dengan memiliki karakteristik sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi tersebut sehingga menonjol tingkat elektabilitasnya yaitu suatu kemampuan atau kecakapan untuk dipilih untuk menduduki suatu jabatan dipemerintahan

Kinerja eva Dwiana Dalam Mempimpin Kota Bandar Lampung

Kinerja menurut Besnadin dan Russel (1993:135) “Kinerja adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu”. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, kinerja Eva Dwiana sebagai pemimpin Kota Bandar Lampung, belum menunjukkan kinerja yang maksimal,

belum ada kebijakan yang monumental, tetapi baru pada tataran mempercantik bandar lampung sehingga kelihatan yang memimpin itu perempuan.

BAB V

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan Kandidasi dan Kepemimpinan Eva Dwiana Walikota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari pola rekrutmen politik berdasarkan arah atau arus karir politik, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengikuti pola kombinasi atau *combination current* dimana beliau sebelum meraih posisi jabatan eksekutif pada tingkat kota terlebih dahulu memulai dengan mengikuti kompetisi legislatif di level di atas nya, yaitu Pemilu anggota DPRD Provinsi Lampung. Sementara itu, dari aspek pola pola seleksi kandidat perempuan yang dilakukan oleh partai politik, pola kandidasi Eva Dwiana lebih mengikuti pola *inclusive-decentralized*, yang artinya para bakal calon diseleksi oleh pengurus partai dari bawah, yaitu DPC Kota Bandar Lampung dan DPD Provinsi Bandar Lampung, akan tetapi penentuan siapa yang akan diusung merupakan prerogatif yang dimiliki oleh DPP partai.
2. Strategi pencalonan hingga kampanye yang dilakukan Eva Dwiana pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 berupa strategi organisasi,

berupa pembagian zona kampanye antara Eva Dwiana dan Deddy Amrullah sehingga cakupannya luas, dan strategi pendukung sumber daya, seperti tim kampanye yang solid, organisasi majelis taklim, pemanfaatan media sosial yang masif.

3. Kepemimpinan Eva Dwiana sebagai Walikota Bandar Lampung cenderung interaktif dan partisipatif, cenderung lebih halus dan lembut serta berhati-hati dalam berkomunikasi, dan lebih banyak menghasilkan program-program kemasyarakatan dibandingkan infrastruktur.

4.3 Saran

Berdasarkan pembahasan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partai politik perlu memperkuat demokrasi internal partai politik, termasuk dalam pemilihan bakal calon kepala daerah. Agar mendapatkan kandidat yang benar-benar mendapatkan dukungan dari bawah, maka pola penentuan kandidat yang akan diusung oleh partai politik diberikan kewenangan bagi pengurus dan anggota partai politik di level DPD dan DPC. Secara lebih konkrit, partai politik perlu menambahkan adanya tahap pemilihan pendahuluan (*primary election*) yang melibatkan anggota partai politik level lokal.
2. Selain program pembangunan dan kemasyarakatan, berbagai program yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender perlu

ditingkatkan lagi, seperti kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi di pemerintahan, misalnya dalam seleksi jabatan tinggi di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, walikota memprioritaskan memilih calon perempuan jika terdapat dalam tiga nama yang diserahkan oleh panel kepada walikota. Kemudian, pendidikan politik dimasifkan agar semakin banyak perempuan aktif terlibat dalam politik agar semakin banyak calon kepala daerah perempuan dan calon anggota legislatif perempuan sehingga komposisi anggota legislatif lebih setara gender. Terakhir, perlu penguatan lembaga terkait termasuk *non-governmental organization* (NGO) untuk menekan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. (2019). Strategi Kepemimpinan Hj. Eva Dwiana Herman Hn Dalam Pengembangan Majelis Taklim Rachmat Hidayat Provinsi Lampung. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anwar, Arifin. (2003). Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Apriani, F. (2019). Faktor Familial Ties Bagi Perempuan Pemimpin Dalam Tata Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp%0A>
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- BPS Kota Bandar Lampung. *Kota Lampung Dalam Angka 2022*. BPS: Bandar Lampung
- Bumi Lampung. 1 Desember 2020. “Tidak Dukung Eva, Kader PDI “Banteng Emas” Beralih Dukung Rycko Menoza”. <https://bumilampung.com/tidak-dukung-eva-kader-pdi-banteng-emas-beralih-dukung-rycko-menoza>
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Dewi, Kurniawati Hastuti and Sandy Nur Ikfal Raharjo (ed) (2021). *Pola Kandidasi dan Kebijakan Responsif Gender Perempuan Kepala Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & LIPI.
- Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. 2022. *Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Bandar Lampung*. Dinas PPPA: Bandar Lampung
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Faraz, N. J. (2013). Kepemimpinan Perempuan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2013. kepemimpinan-perempuan.pdf (uny.ac.id)
- Firmanzah. (2007). Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor
- gaya kepemimpinan. (n.d.). <https://www.rmolsumsel.id/beda-gaya-kepemimpinan-herman-hn-dengan-eva-dwiana>

- Genovese, M. A., & Steckenrider, J. S. (Eds.). (2013). *Women as political leaders: Studies in gender and governing*. Routledge.
- Gunawan, Bainus;, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi politik koalisi partai dalam pemenangan paslon kepala daerah : studi kasus pada pilkada kabupaten nagan raya tahun 2017. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 51–68. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1826>
- Halim, Abdul. (2014). *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung)*. Yogyakarta: LP2B.
- Jenita Permata Sari. (2020). Faktor-Faktor Kemenangan Eva Dwiana-Dedy Amarullah Dalam Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Tahun 2020. UIN Raden Intan Lampung.
- Khairunnisa Maulida, Hertanto, R. C. K. (2021). Strategi Pemenangan Eva Dwiana Dan Deddy Amarullah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.
- Koten, T. (2015). Perempuan dan Pilkada Serentak”.
- Lampost.co, 9 September 2019. “Eva Dwiana Maju di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung.” <https://m.lampost.co/berita-eva-dwiana-maju-di-pemilihan-wali-kota-bandar-lampung.html>
- Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company.
- Mulia, Siti Musdah (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gradedia Pustaka Utama. Cet. I.
- Netizenku. 17 Maret 2021. “Pemkot Bandarlampung Beri Kesempatan Perempuan Duduki Jabatan Strategis”. Diakses melalui <https://netizenku.com/pemkot-bandarlampung-beri-kesempatan-perempuan-duduki-jabatan-strategis/> pada tanggal 19 Oktober 2022.
- Neufeldt, Victoria (ed.) (1984). *Webster’s New World Dictionary*. New York: Webster’s New World Cleveland.
- Novitasari, Mia, Roni, dan Ardiansa, Dirga. (2021). *Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.
- Pierce, R. (2008). *Research Methods in Politics: A Practical Guide*. London: Sage

Publications.

- Pierce, R. (2008). *Research Methods in Politics: A Practical Guide*. Sage Publications.
- Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6 (Nomor 1).
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8965>
- Profil Eva Dwiana. (n.d.). <https://lampung.idntimes.com/life/inspiration/idn-times-hyperlocal/profil-eva-dwiana-wali-kota-bandar-lampung-senang-disapa-bunda?page=all>
- Rasyidin dan Aruni, Fidhia. (2016). *Gender dan Politik, Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Robbi. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Bpjs Kesehatan Cabang Makassar. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanudin.
- Salabi, Amelia. 2018. “Tiga Pola Arus Rekrutmen Politik di Pilkada.” <https://rumahpemilu.org/tiga-pola-arus-rekrutmen-politik-di-pilkada/>
- Showalter, Elaine (ed.) (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Sinar Lampung. 2020. “Eva Dwiana Terancam Ditinggalkan Partai Politik?”. <https://sinarlampung.co/eva-dwiana-terancam-ditinggalkan-partai-politik/>
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I.
- Wahjosumidjo. (1999). *Kepemimpinan kepala Sekolah*. PT Radja Grafindo.
- Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya”. *Jurnal Konstitusi* Vol II No. 2, November 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pola Kandidasi Eva Dwiana

No.	Informan	Pertanyaan
1.	Eva Dwiana (Walikota Bandar Lampung)	Apa yang melatarbelakangi Anda untuk maju dalam pemilihan Walikota tahun 2022? Bagaimana dinamika yang Anda lalui dalam mendapatkan dukungan partai politik? Bagaimana pengaruh suami terhadap kandidasi Anda sebagai calon walikota?
2.	Deddy Amarullah (Wakil Walikota Bandar Lampung)	Apa yang melatarbelakangi Anda untuk maju berpasangan dengan Bu Eva Dwiana? Bagaimana dinamika yang Anda lalui dalam mendapatkan dukungan partai politik?
3.	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Bagaimana dinamika proses pencalonan para kandidat walikota/wakil walikota Bandar Lampung 2022?
4.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Apakah Bawaslu menemukan pelanggaran selama masa pencalonan?
5.	Ketua Tim Pemenangan/ Partai pengusung Pasangan Calon Eva-Deddy	Apa yang melatarbelakangi Anda atau partai Anda sehingga akhirnya mengusung Eva Dwiana? Apakah ada pengaruh identitas gender perempuan dalam pencalonan Eva Dwiana? Berapa pesaing yang dikalahkan oleh Eva Dwiana dalam proses seleksi dan kandidasi internal partai Anda? Apa yang menjadi kelebihan Eva Dwiana sehingga terpilih?
6.	Akademisi	Bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan warga Kota Bandar Lampung terkait pemimpin Perempuan saat ini?

		<p>Bagaimana menurut Saudara terkait pola seleksi internal partai politik saat ini? Bagaimana sebaiknya?</p> <p>Apa yang menurut Anda yang menjadi penentu diusungnya Eva Dwiana oleh partai politik?</p> <p>Apa yang menurut Anda yang menjadi faktor penyebab menangnya Eva-Deddy pada Pilkada 2022?</p>
7.	Tokoh Perempuan/Tokoh Masyarakat	<p>Bagaimana menurut Anda kondisi politik gender saat ini di Kota Bandar Lampung?</p> <p>Apa yang menurut Anda menjadi penyebab pentingnya keterlibatan perempuan di ranah politik?</p> <p>Apa yang menurut Anda pembeda antara Kepala Daerah perempuan dan laki-laki?</p>
8.	Masyarakat/Pemilih	<p>Bagaimana tanggapan Anda terkait majunya perempuan sebagai kepala daerah atau politisi secara umum?</p> <p>Apakah ada atau siapa tokoh perempuan yang Anda harapkan maju sebagai calon Walikota Bandar Lampung?</p> <p>Menurut Anda apa yang menyebabkan terpilihnya Eva Dwiana sebagai walikota?</p>

B. Strategi Pencalonan, Kampanye, dan Kepemimpinan Eva Dwiana

No.	Informan	Pertanyaan
1.	Eva Dwiana (Walikota Bandar Lampung)	<p>Apa yang menjadi hambatan ketika proses pencalonan?</p> <p>Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan pada saat pencalonan tersebut?</p> <p>Apa yang menjadi hambatan ketika proses kampanye?</p> <p>Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan pada saat kampanye tersebut?</p> <p>Apa yang menjadi hambatan pada saat menjalankan pemerintahan saat ini?</p> <p>Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan pada saat menjalankan pemerintahan saat ini?</p>

2.	Deddy Amarullah (Wakil Walikota Bandar Lampung)	Bagaimana menurut Anda perbedaan kepala daerah laki-laki dan perempuan berdasarkan pengalaman Anda sebagai birokrat selama ini? Apa yang menurut Anda yang menjadi tantangan kepala daerah perempuan? Apa yang menjadi ciri khas kepemimpinan walikota Bandar Lampung saat ini?
3.	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Apakah terdapat hambatan pada saat pencalonan dan kampanye pasangan Eva-Deddy? Bagaimana penyelesaian hambatan tersebut?
4.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Apakah terdapat hambatan pada saat pencalonan dan kampanye pasangan Eva-Deddy? Bagaimana penyelesaian hambatan tersebut?
5.	Ketua Tim Pemenangan/ Partai pengusung Pasangan Calon Eva-Deddy	Apa kriteria dalam menentukan bakal calon yang akan diusung? Apa hambatan yang dihadapi tim atau partai pada saat pencalonan Eva-Deddy? Apa yang menyebabkan terpilihnya Eva-Deddy untuk diusung partai? Apa strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
6.	Akademisi	Apa kendala umum yang dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan pada tahap pencalonan dan kampanye? Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Eva Dwiana? Apa yang menjadi ciri khas kepemimpinan Eva Dwiana?
7.	Tokoh Perempuan/Tokoh Masyarakat	Apakah isu keperempuanan menjadi hambatan atau peluang bagi pencalonan dan kampanye Eva Dwiana? Apa yang menjadi ciri khas kepemimpinan Eva Dwiana?
8.	Masyarakat/Pemilih	Bagaimana perbedaan kampanye antara paslon Eva-Deddy dengan pasangan lain? Apa yang menjadi ciri khas kepemimpinan Eva Dwiana?

